

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA BITUNG**

Noni Kumpangpune¹, David P. E. Saerang², Daisy.S.M. Engka³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen – komponen yang terdapat pada anggaran. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis rasio kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Analisis yang digunakan ialah analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektifitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian dan rasio efektifitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan, rasio efisiensi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : *Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*

ABSTRACT

The financial management performance assessment is carried out on the Regional Budget (APBD). The budget as an instrument of government policy must be able to show good performance. The aim is to assess internally and to encourage economic growth so that it is expected to have a positive domino effect, namely reducing unemployment and reducing poverty. Performance related to the budget is a financial performance in the form of a comparison between the components contained in the budget. The purpose of this study is to analyze the ratio of financial performance in the form of independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio to poverty through economic growth. The analysis used is path analysis. The results showed that the independence ratio and effectiveness ratio had a negative and not significant effect on economic growth while the efficiency ratio had a positive and significant effect on economic growth. The independence ratio and effectiveness ratio have a negative and significant effect on poverty whereas, the efficiency ratio has a positive and not significant effect on poverty. Economic growth has a negative and not significant effect on poverty.

Keywords: *Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Economic Growth and Poverty*

1. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan perubahan dalam konsep perencanaan nasional, terutama pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan penyusunan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan era baru dalam globalisasi ekonomi internasional dan era pelaksanaan otonomi daerah dalam tingkat nasional. Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (Mardiasmo, 2004:105). Transparansi keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan – kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. *Value for money* menerapkan 3 (tiga) prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target – target atau tujuan kepentingan publik.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen – komponen yang terdapat pada anggaran.

Perbandingan antara komponen – komponen yang terdapat pada anggaran menurut Halim (2004) diukur dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Sedangkan Mahmudi (2007) mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, derajat kontribusi BUMD, *DebtService Coverage Ratio*, dan rasio pendapatan terhadap utang.

Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan maka ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Kinerja perekonomian setiap daerah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah (laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan).

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi PDRB daerah yang bersangkutan. Di kota Bitung perkembangan perekonomiannya semakin membaik dari tahun ke tahun. Perkembangan ini dapat di lihat dari tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Produk Domestik Regional Bruto (000 000 Rp.) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Tahun 2010 Serta Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung Tahun 2004 – 2017

Tahun	Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2	3
2004	1.575.612	6,88
2005	1.689.041	7,20
2006	1.727.655	2,29
2007	1.820.155	5,35
2008	1.943.199	6,76
2009	2.062.356	6,13
2010	6.845.770	231,94
2011	7.247.816	5,87
2012	7.715.400	6,45
2013	8.229.152	6,66
2014	8.754.484	6,38
2015	9.067.263	3,57
2016	9.537.844	5,19
2017	10.128.304	6,19

Sumber : BPS Kota Bitung

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di mulai pada tahun 2005 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 1.689.041 dan Pertumbuhan Ekonominya mengalami kenaikan sebesar 7.20% dibandingkan PDRB tahun 2004 sebelumnya yaitu hanya 1.575.612, dengan Pertumbuhan Ekonominya sebesar 6,88%. Kemudian di tahun 2006 PDRB mengalami pertumbuhan yang baik yaitu naik menjadi 1.727.655 akan tetapi mengalami penurunan Pertumbuhan Ekonomi menjadi 2.29%. Pada tahun 2007 PDRB mengalami kenaikan atau pertumbuhan yang baik dibandingkan tahun 2006 yaitu menjadi 1.820.155 dengan Pertumbuhan Ekonominya yang naik sebesar 5.35%. Tahun 2008 PDRB juga mengalami pertumbuhan yang baik dibandingkan tahun sebelumnya 2007 yaitu sebesar 1.943.199 dengan Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 6.76,0%. Tahun 2009 PDRB mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 2.062.356 akan tetapi mengalami penurunan Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6.13%. Tahun 2010 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yaitu sebesar 6.845.770 dengan Pertumbuhan Ekonominya sebesar 231,94%. Tahun 2011 PDRB mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 7.247.816 atau mengalami kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,87%. Tahun 2012 PDRB mengalami pertumbuhan yang baik atau mengalami Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,45%. Tahun 2013 PDRB mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 8.229.152 atau mengalami Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,66%. Pada tahun 2014 PDRB mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 8.755.304 dengan Pertumbuhan Ekonomi yang naik sebesar 6,39%. Di tahun 2015 PDRB Kota Bitung terus mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 9.064.842 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56%. Kemudian pada tahun 2016 PDRB Kota Bitung naik sebesar 9.537.844 dengan pertumbuhan ekonomi yang naik sebesar 5,19%. Dan pada tahun 2017 PDRB Kota Bitung mengalami pertumbuhan atau naik sebesar 10.128.304 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,19%. Jadi, rata – rata pertumbuhan ekonomi kota Bitung selama periode tahun 2004 – 2017 adalah 21,92%.

Untuk menunjang kelancaran operasional kegiatan perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah melalui APBD telah mengalokasikan anggaran setiap tahun sesuai dengan prioritas dan kemampuan yang

ada. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab khususnya dibidang keuangan, telah ditempuh kebijaksanaan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pemerintah telah mengatur tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan APBD di kota Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran berimbang dan dinamis, kemandirian, efektivitas dan efisiensi, prioritas serta disiplin anggaran.

Tabel 1.2
Data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah
Kota Bitung Tahun 2004 – 2017

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pengeluaran Belanja (Rp)
1	2	3
2004	156.773.238.771	145.249.686.730
2005	176.609.717.584	169.796.398.044
2006	270.416.595.267	257.714.998.483
2007	324.065.295.008	323.387.591.111
2008	361.409.779.730	366.960.420.078
2009	396.781.312.145	397.263.093.216
2010	448.958.841.389	459.724.036.794
2011	487.359.959.461	483.991.924.455
2012	543.661.389.911	538.645.556.073
2013	635.629.065.296	611.492.465.168
2014	729.466.744.841	716.727.700.397
2015	725.429.140.000	756.178.490.437
2016	894.060.802.521	799.459.099.837
2017	814.006.889.763	819.983.300.290

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Bitung

Tabel 1.2 menunjukkan data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah kota Bitung tahun 2004-2017. Pendapatan daerah kota Bitung mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2017. Pada tahun 2004 pendapatan daerah Rp.156.773.238.771 dan tahun 2017 pendapatan daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 814.006.889.763. Untuk pengeluaran belanja daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2004 angka pengeluaran belanja daerah sebesar Rp. 145.249.686.730 dan dalam tahun 2017 angka pengeluaran belanja daerah meningkat menjadi Rp. 819.983.300.290.

Keterkaitan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan yakni ketika kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Disamping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah.

Kemiskinan merupakan masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita

perbulan dibawah garis kemiskinan. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin di kota Bitung pada tahun 2004-2014.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) dan Presentase Kemiskinan
Kota Bitung Tahun 2004-2017

Tahun	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Presentase Kemiskinan (%)
1	2	3
2004	14.67	7.53
2005	15.00	8.92
2006	19.00	11.23
2007	19.40	11.14
2008	16.80	9.33
2009	16.30	8.93
2010	18.00	9.52
2011	16.10	8.46
2012	14.60	7.45
2013	12.90	6.45
2014	12.87	6.34
2015	14.13	6.57
2016	13.64	6.62
2017	14.00	6.67

Sumber : BPS Kota Bitung

Berdasarkan tabel 1.3 jumlah penduduk miskin di kota Bitung berkurang pada tahun 2014 yaitu 12.87 ribu jiwa. Berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2004 sampai tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kota Bitung mengalami peningkatan, tahun 2004 jumlah penduduk miskin sebesar 14.67 ribu jiwa meningkat menjadi 29.40 ribu jiwa pada tahun 2007. Pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 16.80 ribu jiwa dan turun juga pada tahun 2009 menjadi 16.30 ribu jiwa. Akan tetapi, pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Bitung sebesar 18.00 ribu jiwa. Tahun 2011 sampai 2014 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Bitung dimana pada tahun 2011 sebesar 16.10 ribu jiwa turun sampai 12.87 ribu jiwa pada tahun 2014. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 14.13 ribu jiwa tetapi, turun menjadi 13.64 ribu jiwa pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 14.00 ribu jiwa.

Persentase kemiskinan di kota Bitung tahun 2004-2017 dapat kita lihat pada tabel 1.3. Tahun 2004 sampai 2006 presentasi kemiskinan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2004 sebesar 7.53 persen meningkat sampai tahun 2006 sebesar 11.23%. tahun 2007-2009 presentase kemiskinan mengalami penurunan menjadi 11.14% -8.93%. Tahun 2010 presentase kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 9.52% dan turun sampai 6.34% ditahun 2014. Dalam tiga tahun terakhir 2015,2016 dan 2017 presentase kemiskinan di Kota Bitung mengalami kenaikan menjadi 6.57%, 6.62% dan 6.67%.

Tinjauan Pustaka **Otonomi Daerah**

Menurut Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu menurut Bastian (2006 : 338) ada beberapa asas penting dalam Undang – undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu :

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Kinerja Keuangan

Kinerja (*Performance*) merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim(2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi, sedangkan rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

atau

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Rasio efektifitas diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi Pengeluaran} / \text{Realisasi Penerimaan}$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Faktor penentu efisiensi dan efektifitas sebagai berikut (Budiarto, 2007):

1. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan;
2. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu structural maupun fungsional;
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan;
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat;
5. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Kemiskinan

Dalam kamus ilmiah populer, kata “miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan). Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari – hari. Secara etimologi makna yang terkandung yaitu kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidak seimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja, tetapi juga melihat masalah ketergantungan, harga diri, pendapatan, kesejahteraan dan sebagainya (Hamid, 2008: 13).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono adalah suatu proses kenaikan *output* perkapita secara terus menerus dalam jangka panjang. Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk. Tiga hal yang mempengaruhi pertumbuhan *output* total yang akan dicapai yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia, yang dipresentasikan oleh ketersediaan “tanah”. Menurut Adam Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada akan terus memacu pertumbuhan

output. Namun, pertumbuhan output tersebut akan terhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara optimal.

2. Sumber daya manusia, yang dipresentasikan oleh jumlah penduduk. Adam Smith memandang tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi dan pembagian kerja, dan spesialisasi merupakan salah satu faktor kunci bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja.
3. Akumulasi modal yang dimiliki. Menurut Adam Smith, stok modal memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi. Stok modal dapat diidentikkan sebagai “dana pembangunan”, cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut.

Adapun salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula pemerataan kesejahteraan masyarakat, walaupun ada indikator lainnya yakni distribusi pendapatan. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dimana keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi biasanya bersifat kuantitatif, yakni adanya kenaikan standar pendapatan dan tingkat *output* produksi yang dihasilkan, sedangkan keberhasilan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, tidak hanya pertambahan produksinya saja, tetapi juga adanya perubahan dalam alokasi input dan struktur produksi pada berbagai sektor perekonomian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu – satunya jenis data. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dari dokumen resmi pemerintah daerah kota Bitung. Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran kota Bitung tahun 2004-2017 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Bitung, Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Bitung tahun 2004-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bitung, Data Jumlah Penduduk Miskin kota Bitung tahun 2004-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bitung dan Persentase Kemiskinan di kota Bitung tahun 2004-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan ataupun *softcopy* atas data – data yang diperlukan.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yang dapat mendukung penelitian melalui buku – buku, literatur – literatur dan lain – lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio keuangan dan analisis jalur.

Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Halim, 2014: 267) yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100$$

Atau

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli daerah}} \times 100$$

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100$$

Analisis Path

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut *Rutherford* (1993) Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regres berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (*Sunyoto, 2012:1*). Sedangkan menurut *Webley* (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (*Sunyoto, 2012:1*). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda.

Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik (*Garson, 2003*).

1. Persamaan Sub Struktur 1

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 1 dapat ditulis dengan persamaan matematis berikut

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y_1 merupakan variabel dependen, sedangkan X_1, X_2 dan X_3 adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 1 ini akan dijawab pengaruh variabel X_1, X_2 dan X_3 terhadap Y_1 .

2. Persamaan Sub Struktur 2

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 2 dapat ditulis dengan persamaan matematis berikut :

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y_1 merupakan variabel dependen, sedangkan X_1, X_2, X_3 dan Y_1 adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 2 ini akan dijawab pengaruh variabel X_1, X_2, X_3 dan Y_1 terhadap Y_2 .

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2004-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas dan Rasio Efisiensi. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bitung. Dari data tersebut akandapat diketahui Kinerja Keuangan Kota Bitung. Adapun hasil dari analisis Rasio tersebut adalah:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 3.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bitung

Tahun	PAD	Pendapatan	RKKD	Keterangan
2004	9.603.734.924	156.773.238.771	6,13	Rendah Sekali
2005	10.658.094.000	176.609.717.584	6,03	Rendah Sekali
2006	10.366.002.500	270.416.595.267	3,83	Rendah Sekali
2007	11.781.158.008	324.065.295.008	3,64	Rendah Sekali
2008	12.786.576.275	361.409.779.730	3,54	Rendah Sekali
2009	17.456.517.690	396.781.312.145	4,40	Rendah Sekali
2010	19.896.926.587	448.958.841.389	4,43	Rendah Sekali
2011	23.225.600.000	487.359.959.461	4,77	Rendah Sekali
2012	30.453.039.269	543.661.389.911	5,60	Rendah Sekali
2013	44.000.000.000	635.629.065.296	6,92	Rendah Sekali
2014	71.654.694.447	729.466.744.841	9,82	Rendah Sekali
2015	96.000.000.000	725.429.140.000	13,23	Rendah Sekali
2016	97.390.399.677	894.060.802.521	10,89	Rendah Sekali
2017	116.232.245.700	814.006.889.763	14,28	Rendah Sekali

Sumber: Hasil Olah Data

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama empat belas tahun pada Pemerintah Kota Bitung memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% -25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3.2
Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bitung

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	RE	Keterangan
2004	9.444.723.343	9.603.734.924	98,34	<i>Efektif</i>
2005	8.084.661.789	10.658.094.000	75,85	<i>Kurang Efektif</i>
2006	10.242.334.514	10.366.002.500	98,81	<i>Efektif</i>
2007	10.178.349.950	11.781.158.008	86,40	<i>Kurang Efektif</i>
2008	17.392.736.281	12.786.576.275	136,02	<i>Sangat Efektif</i>
2009	16.822.773.814	17.456.517.690	96,37	<i>Efektif</i>
2010	18.763.528.960	19.896.926.587	94,30	<i>Efektif</i>
2011	25.394.063.796	23.225.600.000	109,34	<i>Sangat Efektif</i>
2012	38.435.120.911	30.453.039.269	126,21	<i>Sangat Efektif</i>
2013	55.173.113.990	44.000.000.000	125,39	<i>Sangat Efektif</i>
2014	83.520.151.103	71.654.694.447	116,56	<i>Sangat Efektif</i>
2015	106.133.530.054	96.000.000.000	110,56	<i>Sangat Efektif</i>
2016	82.927.096.690	97.390.399.677	85,15	<i>Kurang Efektif</i>
2017	122.773.221.957	116.232.245.700	105,63	<i>Sangat Efektif</i>

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Bitung relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 PAD dianggarkan sebesar Rp 9.603.734.924 meningkat menjadi Rp 116.232.245.700 pada tahun 2017. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung pada tahun 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2017 berjalan sangat efektif dapat dilihat pada rasio efektivitas yang menunjukkan angka > 100%. Hal ini berarti pemerintah Kota Bitung sudah mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik karena dilihat dari rasio efektifitas sudah sangat efektif.

c. Rasio Efisiensi

Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan daerah dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Tabel 3.3
Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bitung

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	RE	Keterangan
2004	145.249.686.730	157.792.581.660	92,05	<i>Kurang Efisien</i>
2005	169.796.398.044	173.938.421.495	97,62	<i>Kurang Efisien</i>
2006	257.714.998.483	277.047.879.514	93,02	<i>Kurang Efisien</i>
2007	323.387.591.111	333.647.390.264	96,92	<i>Kurang Efisien</i>
2008	366.960.420.078	369.257.878.870	99,38	<i>Kurang Efisien</i>
2009	397.263.093.216	407.069.964.916	97,59	<i>Kurang Efisien</i>
2010	459.724.036.794	446.819.398.413	102,89	<i>Tidak Efisien</i>
2011	483.991.924.455	490.636.327.652	98,65	<i>Kurang Efisien</i>
2012	538.645.556.073	555.570.392.064	96,95	<i>Kurang Efisien</i>
2013	611.492.465.168	651.336.944.328	93,88	<i>Kurang Efisien</i>
2014	716.727.700.397	745.132.180.691	96,19	<i>Kurang Efisien</i>
2015	756.178.490.437	724.062.475.263	104,44	<i>Tidak Efisien</i>
2016	799.459.099.837	850.221.255.724	94,03	<i>Kurang Efisien</i>
2017	819.983.300.290	869.634.357.168	94,29	<i>Kurang Efisien</i>

Sumber: Hasil Olah Data

Dari perhitungan rasio efisiensi pada tabel diatas dapat dilihat untuk pengelolaan keuangan daerah di Kota Bitung masih kurang efisien. Karena nilai efisiensi 90% - 100%.

Analisis Jalur

Berikut hasil regresi untuk mengetahui rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung dengan menggunakan metode *Path Analysis* (analisis jalur). Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka dapat dilakukan sesuai analisis output SPSS secara berurutan sebagai berikut:

1. Persamaan Substruktur 1

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) (variabel dependen) dengan Rasio Kemandirian (X_1), Rasio Efektivitas (X_2) dan Rasio Efisiensi (X_3) (variabel independen). Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + E_1$$

$$Y_1 = -0.209(X_1) - 0.259(X_2) + 0.533(X_3) + 0.413E_1$$

Tabel 3.4
Persamaan Struktur 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-73106,074	42065,567		-1,738	,113
	X1	-3,497	4,280	-,209	-,817	,433
	X2	-9,057	9,114	-,259	-,994	,344
	X3	90,053	43,977	,533	2,048	,068

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Hasil Olah SPSS

Hasil estimasi variabel rasio kemandirian pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikansi sebesar 0.433 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.433 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak ada hubungan linier antara variabel rasio kemandirian terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ketika rasio kemandirian tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurulita,2018) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2016) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi variabel rasio efektivitas pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa variabel rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikansi sebesar 0.344 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.334 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak ada hubungan linier antara variabel rasio efektivitas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ketika rasio efektivitas tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safrida, 2018) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi variabel rasio efisiensi pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa variabel rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikansi sebesar 0.068 lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.068 < 0.10$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya ada hubungan linier

antara variabel rasio efisiensi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ketika rasio efisiensi tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti,2015) dan (Nurulita, 2018) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.5
Hasil Uji F-statistik
Persamaan Struktur 1

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,635E8	3	5,450E7	1,748	,220 ^a
Residual	3,118E8	10	3,118E7		
Total	4,753E8	13			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y1

Sumber : Hasil Olah SPSS

Secara keseluruhan, nilai variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 1,748 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 3.71 pada tingkat keyakinan 95%

Tabel 3.6
Hasil Uji Determinan R
Persamaan Struktur 1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,587 ^a	,344	,147	5,583.534

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Hasil Olah SPSS

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar $0.344 = 34.4\%$. Artinya, bahwa variable pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variable A rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi adalah sebesar 34.4 % dan sisanya 65.6% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

2. Persamaan Substruktur 2

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kemiskinan (Y_2) (variabel dependen) dengan Rasio Kemandirian (X_1), Rasio Efektivitas

(X₂) dan Rasio Efisiensi (X₃) (variabel independen) melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) (Variabel Intervening). Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4Y_1 + E_1$$

$$Y_1 = -0.779 (X_1) - 0.350 (X_2) + 0.161 (X_3) + 0.080(Y_1) + 0.157E_2$$

Tabel 3.7
Persamaan Struktur 2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,035	9,272		,759	,467
X1	-,004	,001	-,779	-4,219	,002
X2	-,003	,002	-,350	-1,882	,093
X3	,001	,001	,161	,767	,463
Y1	-2,238E-5	,000	-,080	-,371	,719

a. Dependent Variable: Y2

Sumber : Hasil Olah SPSS

Hasil estimasi variabel rasio kemandirian pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikansi sebesar 0.002 lebih kecil dari nilai $\alpha = 1\%$, atau $0.002 < 0.01$, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Artinya ada hubungan linier antara variabel rasio kemandirian terhadap variabel kemiskinan. Hal ini menunjukkan semakin besarnya sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah maka akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2016) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi variabel rasio efektivitas pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa variabel rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikansi sebesar 0.093 lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.093 < 0.10$, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Artinya ada hubungan linier antara variabel rasio efektivitas terhadap variabel kemiskinan. (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pembuat keputusan untuk pembuatan tarif pelayanan publik. Faktor ekonomi yang dipertimbangkan harus mengetahui seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membayar dan dampaknya terhadap perekonomian, dengan begitu maka meski efektivitas PAD yang semakin meningkat belum tentu bisa menyebabkan penurunan kemiskinan di daerah, sehingga pemerintah harus ekstra berhati-hati dalam memberikan keputusan terkait dengan PAD terutama pada pajak dan retribusi daerah (Permatasari, 2016)

Hasil estimasi variabel rasio efisiensi pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa variabel rasio efisiensi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikansi sebesar 0.463 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.463 > 0.10$, maka H₁ ditolak dan H₀ diterima. Artinya tidak ada hubungan linier antara variabel rasio efisiensi terhadap variabel kemiskinan. Hal ini diduga disebabkan karena pengeluaran pemerintah untuk memperoleh pendapatannya lebih besar, dimana hal tersebut menyebabkan kurangnya efisiennya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga penerimaan pendapatan yang semestinya dapat melebihi dari pengeluaran tidak dapat digunakan untuk meningkatkan program-program dalam penanggulangan kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Ani, 2014) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi variabel pertumbuhan ekonomi pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikansi sebesar 0.719 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.719 > 0.10$, maka H₁ ditolak dan H₀ diterima. Artinya tidak ada hubungan linier antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ani, 2014) menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan hal ini disebabkan karena penerimaan daerah dari tahun ke tahun tidak terlalu tinggi, sehingga kurang mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan program-program dalam menanggulangi tingkat kemiskinan.

Tabel 3.8
Hasil Uji F-statistik
Persamaan Struktur 2
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	26,276	4	6,569	5,522	,016 ^a
Residual	10,706	9	1,190		
Total	36,981	13			

a. Predictors: (Constant), Y1, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y2

Sumber : Hasil Olah SPSS

Secara keseluruhan, nilai variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai variabel kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 5,522 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 3.63 pada tingkat keyakinan 95%.

Tabel 3.9
Hasil Uji Determinan R
Persamaan Struktur 2

Model Summary

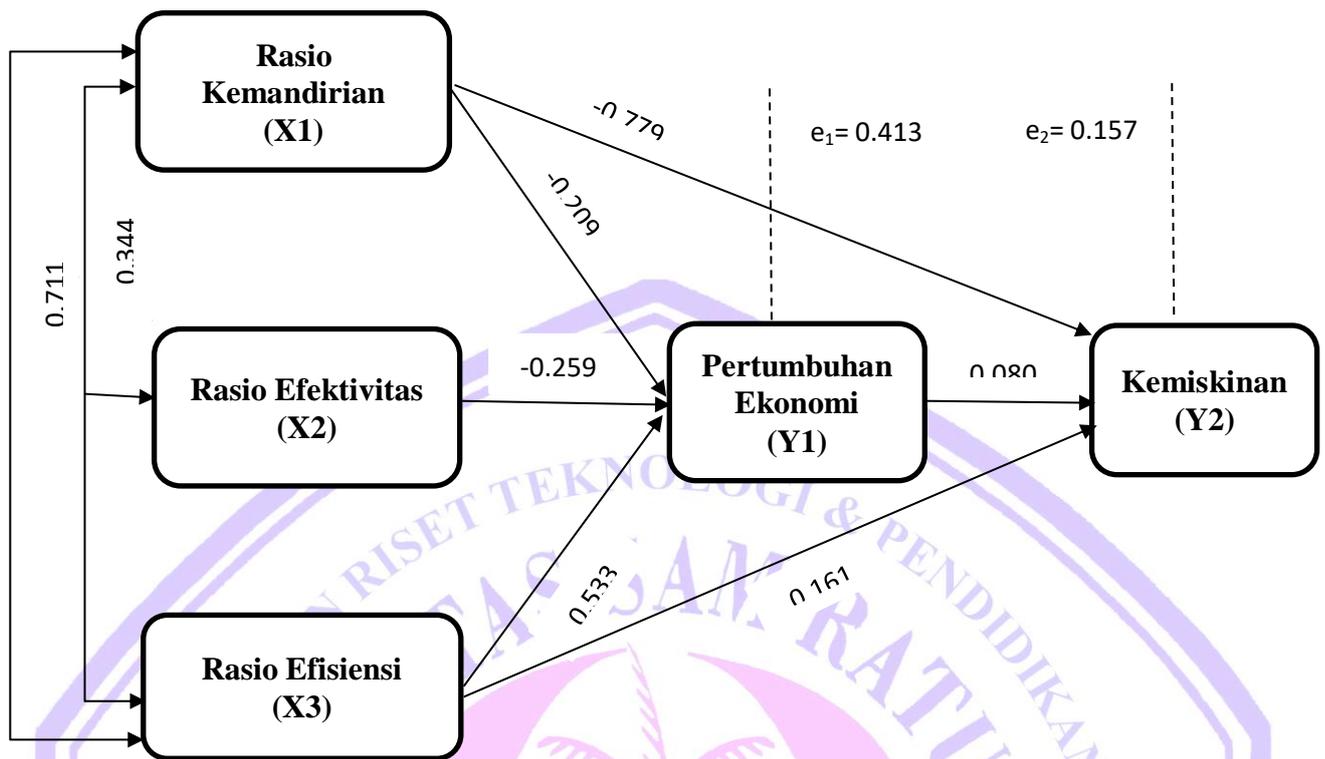
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,843 ^a	,711	,582	1.091

a. Predictors: (Constant), Y1, X2, X1, X3

Sumber : Hasil Olah SPSS

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar $0.711 = 71.1\%$. Artinya, bahwa variable kemiskinan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variable rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 71.1 % dan sisanya 28.9% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Jadi, keseluruhan pengaruh kausalitas variable Rasio Kemandirian (X_1), Rasio Efektivitas (X_2) dan Rasio Efisiensi (X_3) (variabel independen) variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) dan dampaknya terhadap variabel Kemiskinan (Y_2) sebagai berikut:



Gambar 4.1 Diagram Jalur Keseluruhan Struktur Penelitian

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efisiensi berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.
7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk pemerintah Kota Bitung diharapkan lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya sehingga dengan pengelolaan yang baik untuk potensi yang ada akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah serta dapat memanfaatkan PAD sebaik mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, dan mampu membuat lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001.** Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Abdul Halim. 2002.** Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2004.** Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul Halim, 2007,** Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008.** Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014.** Akuntansi Keuangan Daerah.Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006.**Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.Jakarta:Erlangga.
- David, Garson.2003.** Aplikasi Amos. Penerbit PT Gramedia Utama. Jakarta.
- Eli Safrida, Selfi Afriani Gultom (2018)** Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatra Utara
- Mahmudi. 2010.** Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2004.**Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :Andi.
- Mahmudi. 2007.** Manajemen Kinerja Sektor Publik.. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Ni Luh Nana Putri Ani, A.A.N.B. Dwirandra (2014)** Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota
- Ni Ketut Anindya Permatasari, A.A.N.B. Dwirandra (2016)** Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan
- Syamsudin, Bayu Tri Cahya, Syahrina Nurmala Dewi, (2015)** Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan
- Suci Nurulita, Hamdani Arifulsyah, Yefni (2018)** Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau
- Rutherford, Robert D dan Minja Kim Choe. (1993).** Statistical Model For Causal Analysis. New York : John Wiley & Sons.Inc
- Webley, Paul dan Stephan Lea. (1997).** Path Analysis. Exeter, UK: Department Of Psychology, University Of Exeter.